

## PENGUTAN KAPASITAS APARATUR DESA MELALUI PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR DESA SIENJO KECAMATAN TORIBULU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

\*Moh Ahdi<sup>1</sup>, Moh Mahmud<sup>2</sup>

[mohahdi@stiapembangunanpalu.ac.id](mailto:mohahdi@stiapembangunanpalu.ac.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip *good governance* di Desa Sienjo, Kabupaten Parigi Moutong. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya pemahaman dan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada aparatur desa. Materi yang diberikan meliputi konsep *good governance*, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi desa, serta praktik pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam menerapkan prinsip *good governance*, yang tercermin dari meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya transparansi administrasi, akuntabilitas kinerja, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

**Kata kunci:** Kapasitas aparatur desa, *Good governance*, Pemerintahan desa, Pengabdian kepada masyarakat.

### ABSTRACT

*This community service activity aims to strengthen the capacity of village officials in implementing the principles of good governance in Sienjo Village, Parigi Moutong Regency. The problems faced by the partner include the suboptimal understanding and application of the principles of transparency, accountability, participation, as well as effectiveness and efficiency in village governance. The community service activities were carried out through socialization, training, and mentoring methods for village officials. The materials provided covered the concept of good governance, the application of good governance principles in village administration, and the practice of transparent and accountable public services. The results of the activity indicate an improvement in the understanding and capacity of village officials in applying good governance principles, as reflected in increased awareness of the importance of administrative transparency, performance accountability, and community participation in the village governance process. This activity is expected to contribute to improving the quality of village governance and supporting the realization of more effective and community-oriented public services.*

**Keywords:** *village officials' capacity, good governance, village governance, community service*

## LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem administrasi publik yang berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Menurut Ndraha (2011), pemerintahan pada level paling bawah memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga kualitas tata kelolanya sangat menentukan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintahan desa dituntut untuk mampu menyelenggarakan tata kelola yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, konsep *good governance* menjadi paradigma utama dalam reformasi administrasi publik. UNDP (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai proses pengelolaan sumber daya publik yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berkeadilan. Sejalan dengan itu, World Bank (1992) menekankan bahwa *good governance* berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa menjadi sangat penting mengingat desa mengelola kewenangan pemerintahan dan sumber daya keuangan yang semakin besar, khususnya melalui dana desa.

Aparatur desa merupakan aktor kunci dalam implementasi *good governance* di tingkat lokal. Menurut Dwiyanto (2008), kualitas tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun

sikap dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Kapasitas aparatur yang rendah akan berdampak pada lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik.

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di pemerintahan desa masih menghadapi sejumlah kendala. Rondinelli dan Cheema (1983) menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada level pemerintahan lokal sering menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan desentralisasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kondisi serupa juga ditemukan pada pemerintahan desa, di mana aparatur desa belum sepenuhnya memahami konsep *good governance* dan bagaimana menerapkannya dalam praktik administrasi dan pelayanan publik sehari-hari.

Kondisi tersebut juga terlihat di Desa Sienjo, Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat keterbatasan dalam penerapan prinsip transparansi administrasi, akuntabilitas kinerja aparatur, serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Mardiasmo (2009), lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam sektor publik dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat serta menghambat efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas menuntut aparatur desa untuk bekerja secara profesional dan responsif.

Osborne dan Gaebler (1992) menekankan pentingnya orientasi pelayanan publik yang berfokus pada hasil (*results-oriented government*) dan kebutuhan masyarakat. Tanpa pemahaman dan kapasitas yang memadai, aparatur desa akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa melalui penerapan prinsip *good governance* di Desa Sienjo, Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan kemampuan praktis aparatur desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, dengan mitra utama Pemerintah Desa Sienjo. Sasaran kegiatan adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Metode pelaksanaan pengabdian dirancang menggunakan pendekatan partisipatif, dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip *good governance* secara berkelanjutan.

### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan mitra. Pada tahap ini dilakukan observasi

awal dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menggali permasalahan yang dihadapi dalam penerapan prinsip *good governance*. Menurut Creswell (2014), tahap awal yang sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan konteks mitra. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan pendampingan.

### **2. Tahap Sosialisasi**

Tahap sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai konsep dasar *good governance*. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi secara ceramah interaktif yang disertai dengan diskusi. Materi meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan sosialisasi ini sejalan dengan pandangan UNDP (1997) yang menekankan pentingnya pemahaman bersama (*shared understanding*) dalam penerapan *good governance*.

### **3. Tahap Pelatihan**

Pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan praktis aparatur desa dalam menerapkan prinsip *good governance* dalam aktivitas administrasi dan pelayanan publik. Pelatihan difokuskan pada simulasi dan praktik sederhana, seperti penyusunan administrasi desa yang transparan, mekanisme pertanggungjawaban kinerja, serta cara melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Dwiyanto (2008), peningkatan kapasitas aparatur tidak hanya membutuhkan pemahaman konseptual, tetapi juga keterampilan teknis yang aplikatif.

### **4. Tahap Pendampingan**

Pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan

penerapan prinsip *good governance* setelah kegiatan pelatihan. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan bimbingan langsung kepada aparatur desa dalam menerapkan materi yang telah diberikan pada kegiatan sebelumnya. Pendekatan pendampingan ini sejalan dengan pendapat Rondinelli dan Cheema (1983) yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan lokal memerlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan.

#### 5. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui observasi, diskusi, dan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian. Indikator evaluasi meliputi peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip *good governance*, perubahan sikap, serta kemampuan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Patton (2008), evaluasi partisipatif penting untuk mengukur dampak nyata dari suatu program pengabdian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sienjo, Kabupaten Parigi Moutong, menunjukkan hasil yang positif dalam upaya penguatan kapasitas aparatur desa melalui penerapan prinsip *good governance*. Kegiatan yang meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan dan mendapatkan respons yang baik dari aparatur desa sebagai mitra kegiatan.

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai konsep

dan prinsip *good governance*. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian aparatur desa masih memaknai *good governance* sebatas pada aspek administratif formal. Setelah kegiatan sosialisasi, aparatur desa mulai memahami bahwa *good governance* mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan definisi *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan bertanggung jawab.

Pada tahap pelatihan, aparatur desa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menerapkan prinsip *good governance* secara praktis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aparatur desa mulai mampu menyusun administrasi desa secara lebih tertib dan transparan, serta memahami pentingnya pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Peningkatan kemampuan ini mendukung pandangan Dwiyanto (2008) yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, kegiatan pendampingan memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sikap aparatur desa. Aparatur desa menjadi lebih terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan desa. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rondinelli dan Cheema (1983) yang menekankan bahwa penguatan kapasitas

pemerintahan lokal memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan.

## **2. Pembahasan**

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa melalui penerapan prinsip *good governance* merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini mampu menjawab permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra.

Dari segi teoritik, temuan ini mendukung konsep *good governance* yang dikemukakan oleh World Bank (1992), yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan meningkatnya kapasitas aparatur desa, potensi terjadinya ketidakefisienan dan rendahnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diminimalkan. Hal ini menjadi penting mengingat desa memiliki kewenangan yang besar dalam pengelolaan dana dan program pembangunan.

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat yang mulai direspons secara positif oleh aparatur desa menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dari pendekatan yang bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih partisipatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Osborne dan Gaebler (1992) yang menekankan pentingnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta kualitas pelayanan publik. Namun demikian, hasil kegiatan pengabdian

juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* memerlukan komitmen berkelanjutan dari aparatur desa.

Peningkatan kapasitas yang telah dicapai melalui kegiatan pengabdian perlu diikuti dengan dukungan kebijakan internal desa dan pembinaan berkelanjutan agar perubahan yang terjadi dapat bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) yang menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan publik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu aparatur, tetapi juga oleh sistem dan lingkungan organisasi yang mendukung.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa, tetapi juga menjadi langkah awal dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa melalui penerapan prinsip *good governance* merupakan strategi yang relevan dan aplikatif dalam konteks pemerintahan desa di Kabupaten Parigi Moutong.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sienjo, Kabupaten Parigi Moutong, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa melalui penerapan prinsip *good governance* merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, aparatur desa mengalami peningkatan pemahaman konseptual serta kemampuan praktis dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif pada sikap dan perilaku aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur desa menjadi lebih terbuka terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta mulai menunjukkan kesadaran akan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas aparatur desa merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi *good governance* di tingkat pemerintahan lokal.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa, tetapi juga berkontribusi pada upaya jangka panjang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur desa melalui penerapan prinsip *good governance* diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi pada desa-desa lain dengan karakteristik serupa, guna mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank.